Pendidikan Kabupaten Simeulue: Potret dan Insight untuk Warga

Kategori: Majulah Pendidikan · Diunduh dari BalaiWarga.NET

Pendidikan Kabupaten Simeulue: Potret dan Insight untuk Warga Diperbarui 28 Juni 2026

Ringkasan Data Pendidikan Kabupaten Simeulue

> *Menurut data BPS pertengahan 2024, sebanyak **20,82% penduduk** Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh tidak pernah bersekolah atau tidak menamatkan SD — salah satu indikator yang mencerminkan tantangan akses pendidikan di wilayah kepulauan ini. Hanya **9,23% penduduk** yang berpendidikan tinggi (D1 ke atas), dengan rincian 6,04% berpendidikan S1 dan 1,95% D3. Pengeluaran per kapita Kabupaten Simeulue sebesar **Rp 8,106 juta per tahun** merupakan yang terendah di seluruh kabupaten/kota Provinsi Aceh, menurut BPS Provinsi Aceh (2024). Pemkab Simeulue aktif menyelenggarakan **program beasiswa daerah** bagi mahasiswa tidak mampu dan berprestasi sejak 2024. Data spesifik RLS, HLS, IPM, dan APM/APK tingkat kabupaten sedang diperbarui — pantau di balaiwarga.net.*

Hanya 9 dari 100 Warga Simeulue yang Berpendidikan Tinggi — Terendah di Antara Kabupaten Kepulauan Aceh

Menurut data BPS pertengahan 2024, 9,23% penduduk Kabupaten Simeulue yang berusia produktif telah menamatkan pendidikan tinggi (D1 ke atas). Kondisi ini mencerminkan tantangan nyata: ketiadaan perguruan tinggi di pulau ini mengharuskan lulusan SMA menempuh perjalanan lintas laut menuju Banda Aceh. Warga dapat memanfaatkan informasi akreditasi sekolah di ban-pdm.id untuk memilih sekolah terbaik sejak dini sebagai fondasi perjalanan pendidikan anak.

Infografis Data Pendidikan Kabupaten Simeulue

Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Simeulue, 2024

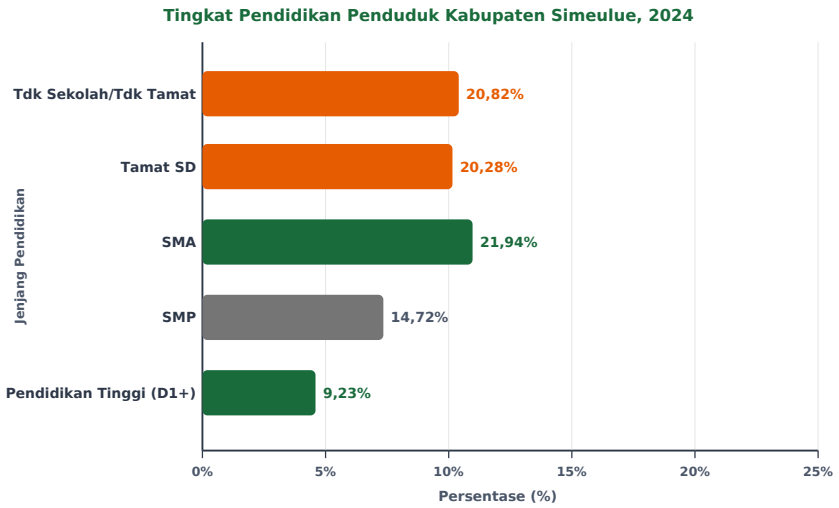

Sumber: BPS / Databoks (2024). Dari total ~96.500 penduduk usia produktif Simeulue, 20,82% belum menamatkan sekolah dasar.

Menurut data BPS pertengahan 2024, distribusi pendidikan penduduk Kabupaten Simeulue menunjukkan bahwa kelompok terbesar adalah lulusan SMA (21,94%) dan kelompok yang tidak pernah atau belum menamatkan SD (20,82%). Kelompok berpendidikan tinggi hanya mencakup 9,23% dari total penduduk usia produktif, terdiri atas 6,04% S1, 1,95% D3, dan 1,10% D1/D2. Angka ini mencerminkan tantangan akses pendidikan lanjutan di wilayah kepulauan yang jauh dari fasilitas perguruan tinggi.

Komposisi Penduduk Berpendidikan Tinggi Kabupaten Simeulue, 2024

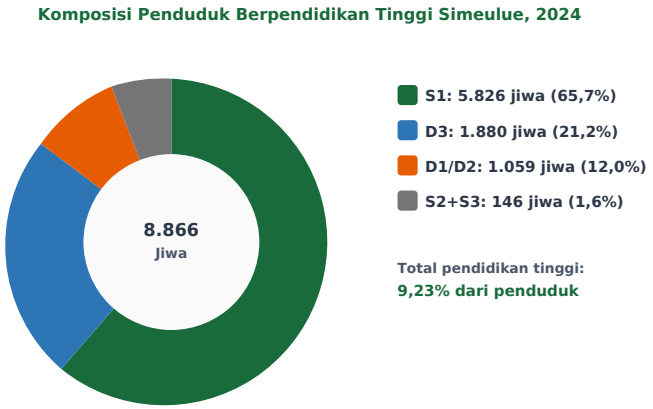

Sumber: BPS / Databoks (2024). S1 mendominasi kelompok berpendidikan tinggi di Simeulue dengan 5.826 jiwa dari total 8.866 jiwa.

Dari 8.866 penduduk Kabupaten Simeulue yang berpendidikan tinggi per pertengahan 2024, sebanyak 65,7% merupakan lulusan S1 (5.826 jiwa), 21,2% D3 (1.880 jiwa), dan 12% D1/D2 (1.059 jiwa). Hanya 141 jiwa yang berpendidikan S2 dan 5 jiwa S3. Komposisi ini menunjukkan keterbatasan akses terhadap jenjang pascasarjana, yang umumnya hanya tersedia di luar Pulau Simeulue.

Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Aceh, 2024

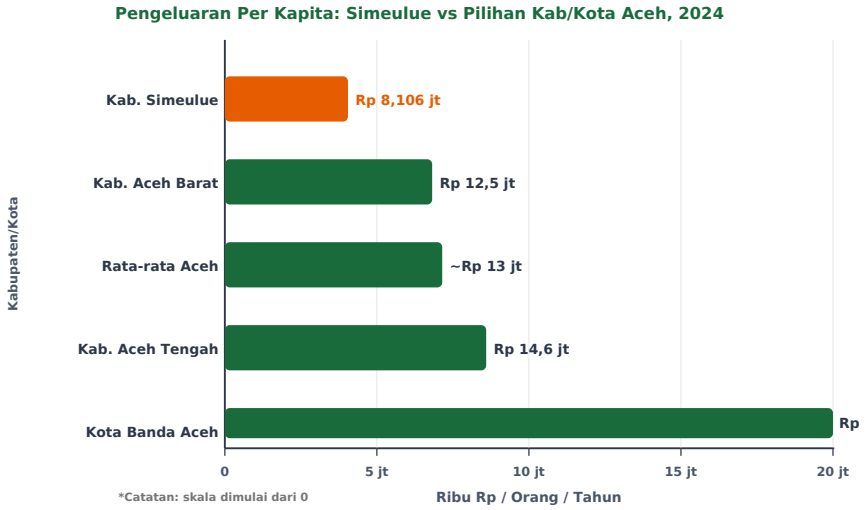

Sumber: BPS Provinsi Aceh (2024). Pengeluaran per kapita Simeulue Rp 8,106 juta adalah yang terendah di Aceh, 2,2 kali lebih rendah dari Banda Aceh.

Menurut BPS Provinsi Aceh tahun 2024, pengeluaran per kapita Kabupaten Simeulue sebesar Rp 8,106 juta per tahun merupakan yang terendah di antara seluruh 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Angka ini hanya 45% dari pengeluaran per kapita Kota Banda Aceh (Rp 18,1 juta) dan jauh di bawah rata-rata Aceh. Kesenjangan daya beli ini secara langsung mempengaruhi kemampuan keluarga dalam membiayai pendidikan lanjutan anak di luar pulau.

Program Bantuan Pendidikan Aktif di Kabupaten Simeulue

Program	Sasaran	Penyelenggara	Status
BOS (Bantuan Operasional Sekolah)	Seluruh sekolah negeri & swasta SD-SMA	Kemendikdasmen	Aktif
PIP (Program Indonesia Pintar)	Siswa SD-SMA dari keluarga tidak mampu	Kemendikdasmen	Aktif
Beasiswa Pemkab Simeulue 2024	Mahasiswa tidak mampu & berprestasi	Pemkab Simeulue	Aktif
Kurikulum Merdeka (Kurikulum Nasional)	Seluruh sekolah PAUD hingga SMA/SMK	Kemendikdasmen	Implementasi
Catatan: Untuk wilayah 3T termasuk Simeulue, batas transisi Kurikulum Merdeka diperpanjang hingga 2026/2027.			

Sumber: Kemendikdasmen, Pemkab Simeulue (2024). Empat program aktif mendukung akses dan mutu pendidikan di Simeulue.

Sejumlah program bantuan pendidikan aktif berjalan di Kabupaten Simeulue. BOS mencakup seluruh sekolah negeri dan swasta, sedangkan PIP memberikan bantuan tunai langsung kepada siswa dari keluarga tidak mampu. Pemkab Simeulue secara mandiri menyelenggarakan beasiswa mahasiswa sejak 2024. Implementasi Kurikulum Merdeka di wilayah 3T seperti Simeulue mendapat toleransi hingga tahun ajaran 2026/2027 sesuai Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024.

Distribusi Jenjang Pendidikan Tinggi Penduduk Simeulue vs Nasional, 2024

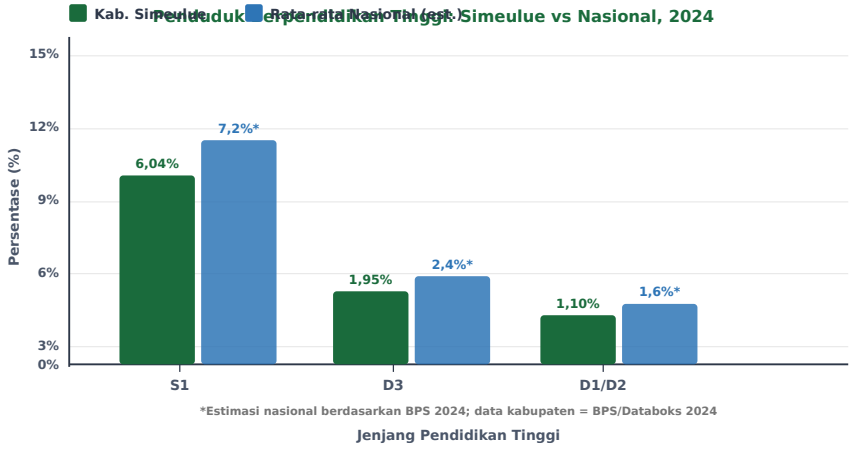

Sumber: BPS/Databoks (2024). Proporsi S1 Simeulue (6,04%) masih di bawah rata-rata nasional sekitar 7,2%.

Perbandingan antara Kabupaten Simeulue dan rata-rata nasional menunjukkan kesenjangan pada semua jenjang pendidikan tinggi. Menurut data BPS/Databoks 2024, proporsi lulusan S1 di Simeulue sebesar 6,04% masih di bawah estimasi nasional sekitar 7,2%. Kesenjangan ini mencerminkan hambatan struktural yang dihadapi masyarakat kepulauan dalam mengakses pendidikan tinggi, terutama ketiadaan kampus di wilayah ini.

Indikator Tantangan Pendidikan Kabupaten Simeulue, 2024

Indikator	Nilai Simeulue	Sumber	Tahun
Penduduk tidak bersekolah/tidak tamat SD	20,82%	BPS/Databoks	2024
Penduduk berpendidikan tinggi (D1+)	9,23%	BPS/Databoks	2024
Pengeluaran per kapita (terendah di Aceh)	Rp 8,106 juta/th	BPS Aceh	2024
Perguruan tinggi di Kabupaten Simeulue	Tidak ada	PDDikti	2024
Data RLS, HLS, IPM, APM kabupaten spesifik	Data sedang diperbarui	BPS Kab.	—
Data spesifik RLS/HLS/IPM/APM Kabupaten Simeulue sedang diperbarui — pantau di balaiwarga.net			

Sumber: BPS Provinsi Aceh, BPS/Databoks, PDDikti (2024). Ketiadaan PT lokal menjadi hambatan struktural utama akses pendidikan tinggi di Simeulue.

Empat indikator utama menggambarkan tantangan pendidikan di Kabupaten Simeulue: tingginya proporsi penduduk yang belum menamatkan SD (20,82%), rendahnya akses ke pendidikan tinggi (9,23%), daya beli terendah di Aceh (Rp 8,106 juta/tahun), dan ketiadaan perguruan tinggi di wilayah kepulauan ini. Data RLS, HLS, APM, dan IPM spesifik kabupaten sedang dalam proses pembaruan oleh BPS Kabupaten Simeulue.

Berdasarkan penelusuran PDDikti, **tidak terdapat perguruan tinggi yang beroperasi di Kabupaten Simeulue**. Warga yang ingin melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana perlu menempuh perjalanan ke Banda Aceh — kota dengan perguruan tinggi negeri terbesar di Aceh, seperti Universitas Syiah Kuala (terakreditasi Unggul, BAN-PT) dan UIN Ar-Raniry — yang berjarak sekitar 150 km plus penyeberangan laut dari Sinabang, atau menuju kampus di Meulaboh yang lebih dekat secara geografis. Pemkab Simeulue menyediakan beasiswa daerah untuk membantu mahasiswa yang menghadapi tantangan biaya ini.

Berita Pendidikan Terkini Kabupaten Simeulue

Disdik Aceh Dorong Pendidikan Berkualitas di Simeulue, Fokus Kualitas Guru dan Lulusan

Kepala Dinas Pendidikan Aceh menggelar pertemuan dengan pengawas sekolah serta kepala SMA, SMK, dan SLB se-Kabupaten Simeulue pada Mei 2025, mengusung tema peningkatan kompetensi guru dan lulusan menuju perguruan tinggi unggulan.

Baca selengkapnya — Nukilan.id, 8 Mei 2025

Pj Bupati Simeulue Tinjau Fasilitas Pendidikan dan Sejumlah Proyek Infrastruktur

Penjabat Bupati Simeulue melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah sekolah dan proyek infrastruktur di beberapa lokasi dalam Kabupaten Simeulue untuk memastikan kelayakan sarana pendidikan bagi siswa.

Baca selengkapnya — Humas Prokopim Simeulue, 24 Agustus 2024

Kacabdisdik Simeulue Berikan Sertifikat ke Sekolah Terbanyak Lulus SNBP dan Santunan Anak Yatim

Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2024, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Simeulue memberikan penghargaan kepada sekolah yang meluluskan siswanya terbanyak pada Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

Baca selengkapnya — Disdik Aceh, Mei 2024

Beasiswa Pendidikan Kabupaten Simeulue Tahun 2024 Dibuka untuk Mahasiswa Tidak Mampu

Pemerintah Kabupaten Simeulue membuka pendaftaran beasiswa 2024 bagi mahasiswa tidak mampu dan berprestasi berdasarkan regulasi Perbup, sebagai upaya meningkatkan semangat dan kualitas pendidikan tinggi warga asal Simeulue.

Baca selengkapnya — Humas Prokopim Simeulue, Februari 2024

RPJMD Kabupaten Simeulue 2025-2029 Tetapkan Pendidikan Berkualitas sebagai Prioritas Pembangunan

Dokumen RPJMD Kabupaten Simeulue 2025-2029 yang ditandatangani Bupati Juli 2025 mencantumkan pendidikan berkualitas sebagai salah satu misi utama, dengan target peningkatan rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan angka partisipasi murni.

Baca selengkapnya — Pemkab Simeulue, Juli 2025

MTQ Aceh ke-36 Diselenggarakan di Kabupaten Simeulue, Libatkan Ribuan Peserta

Kabupaten Simeulue berhasil menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Aceh ke-36 pada Desember 2023, menampilkan peran pesantren dan pendidikan agama dalam ekosistem pendidikan masyarakat Simeulue.

Baca selengkapnya — Suara Muhammadiyah, Desember 2023

Setda Portal Simeulue Catat Berita Pendidikan & Kebudayaan Desember 2025

Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue melalui portal resminya mencatat sejumlah agenda pendidikan dan kebudayaan pada Desember 2025, mencerminkan kesinambungan program pendidikan daerah memasuki periode pemerintahan baru.

Baca selengkapnya — Setda Kabupaten Simeulue, Desember 2025

Pembahasan: Apa Kata Data dan Berita untuk Warga Kabupaten Simeulue

Pola Data Pendidikan: Tantangan Kepulauan dan Daya Beli dalam Bingkai Human Capital

Data pendidikan Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh menggambarkan tantangan yang khas bagi wilayah kepulauan terdepan Indonesia. Dalam kerangka pemikiran Soedjatmoko — yang menekankan pendidikan sebagai motor transformasi sosial khususnya di daerah tertinggal — kondisi Simeulue mencerminkan

perlunya intervensi struktural yang melampaui sekadar penyediaan sekolah. Dengan pengeluaran per kapita hanya Rp 8,106 juta per tahun (terendah di Aceh, BPS 2024) dan 20,82% penduduk yang belum menamatkan SD, tantangan akses ekonomi terhadap pendidikan menjadi nyata. Mubyarto, melalui konsep human capital kerakyatan, mengingatkan bahwa hambatan ekonomi keluarga adalah penyebab utama putus sekolah di daerah terpencil. Data menunjukkan hanya 9,23% warga Simeulue yang telah menyentuh jenjang pendidikan tinggi (BPS/Databoks, 2024), jauh di bawah proporsi di kota-kota Aceh lainnya. Ketiadaan perguruan tinggi di pulau ini menciptakan efek saringan: hanya keluarga dengan kemampuan finansial cukup yang dapat mengirimkan anaknya berkuliah ke Banda Aceh atau kota lain, memperlebar kesenjangan sumber daya manusia antara Simeulue dan wilayah daratan Aceh.

Sintesis Berita: Upaya Peningkatan Mutu dalam Konteks Kebijakan Nasional dan Regulasi Aceh

Rangkaian berita pendidikan Simeulue 2024-2025 mencerminkan pergerakan positif pada level kebijakan. Pertemuan Disdik Aceh dengan kepala sekolah SMA/SMK/SLB se-Simeulue (Mei 2025) dan pemberian penghargaan kepada sekolah terbanyak meluluskan siswa SNBP (Hardiknas 2024) menunjukkan upaya menghubungkan Simeulue dengan jalur pendidikan tinggi nasional. Hal ini sejalan dengan program Merdeka Belajar dan kebijakan BOS/PIP yang mendorong partisipasi siswa dari keluarga kurang mampu. Dalam perspektif Ki Hajar Dewantara yang menekankan asas "Tut Wuri Handayani" — pendidikan sebagai pendorong dari belakang — peran aktif pemkab melalui program beasiswa 2024 dan RPJMD 2025-2029 yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama merupakan wujud nyata dari pendekatan tersebut. Adapun konteks regulasi daerah Aceh yang unik — termasuk Qanun Aceh tentang pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis nilai Islam — mewarnai ekosistem pendidikan Simeulue dengan kehadiran madrasah dan lembaga keagamaan yang melengkapi sistem formal Kemendikdasmen. H.A.R. Tilaar, melalui analisis disparitas kualitas antardaerah, mengingatkan bahwa peningkatan mutu di wilayah seperti Simeulue memerlukan pendekatan yang berbeda dari daerah perkotaan. Warga dapat memantau perkembangan akreditasi sekolah di ban-pdm.id dan memanfaatkan program beasiswa daerah sebagai jalur masuk ke jenjang pendidikan tinggi.

Pertanyaan Warga tentang Pendidikan di Kabupaten Simeulue

Bagaimana cara mengecek akreditasi sekolah di Kabupaten Simeulue?

Warga dapat mengecek akreditasi sekolah di Kabupaten Simeulue melalui situs ban-pdm.id dengan memasukkan nama sekolah atau NPSN. Data akreditasi diperbarui secara berkala oleh BAN-PDM dan

mencakup semua jenjang mulai SD hingga SMA.

Bagaimana cara mendapatkan beasiswa pendidikan di Kabupaten Simeulue?

Pemerintah Kabupaten Simeulue menyediakan beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu dan berprestasi setiap tahun melalui program resmi pemkab. Informasi persyaratan dan pendaftaran dapat dipantau di situs resmi Humas Prokopim Kabupaten Simeulue atau kantor dinas terkait.

Apakah ada perguruan tinggi di Kabupaten Simeulue?

Hingga data terkini, belum terdapat perguruan tinggi yang beroperasi di Kabupaten Simeulue. Lulusan SMA/SMK yang ingin melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana perlu menempuh perjalanan ke Banda Aceh sebagai kota PT terdekat, berjarak sekitar 150 km ditambah penyeberangan laut.

Apa program bantuan pendidikan yang tersedia untuk siswa di Simeulue?

Siswa di Kabupaten Simeulue dapat mengakses beberapa program bantuan: BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari pemerintah pusat, PIP (Program Indonesia Pintar) bagi siswa kurang mampu, serta beasiswa daerah dari Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk mahasiswa perguruan tinggi.

Mengapa tingkat pendidikan tinggi di Simeulue masih rendah dan apa dampaknya bagi keluarga?

Menurut data BPS mid-2024, hanya 9,23% penduduk Simeulue yang berpendidikan tinggi (D1 ke atas), jauh di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini berkaitan dengan keterbatasan akses perguruan tinggi di pulau serta daya beli yang rendah. Keluarga dapat mendorong anak menempuh beasiswa dan memanfaatkan kuliah daring yang kini tersedia luas.

> *Disclaimer: Artikel ini disusun sebagai informasi awal dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) berdasarkan data dan referensi yang tersedia hingga tanggal publikasi. Konten ini bersifat edukatif dan tidak menggantikan saran profesional, konsultasi langsung, atau kebijakan resmi yang berlaku. Selalu verifikasi ke instansi terkait, asosiasi industri, atau sumber primer yang relevan.*